

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1996). *Penilaian Program Pendidikan*. Yogyakarta. PT. Bina Aksara.
- Blakely, E.J. (1989). *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. California : Sage Publication, Inc, Newburry Park.
- Bogman, R. & Taylor, S.J. (1975). *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian. Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bryson, J M. (1995). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization : A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. San Fransisco : Jossey-Bass Publishers.
- Bugis, M.2015. ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH. JURNAL MANEKSI.
- Davey, K.J.,(1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Dirgantoro, C. (2001). *Manajemen Stratejik : Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta : Grasindo.
- Effendi, S. (1989). *Seri Monografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta No. 01 Tahun 1989*. Yogyakarta.
- Islamy, I. (1986). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Jones, R. & Pendlebury, M. (1996). *Public Sector Accounting. (fourth edition)*. London: Pitman Publishing.
- Kaho, Y.R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Keban, Y.T. (1995). *Indikator Kinerja Pemerintahan daerah : Pendekatan manajemen dan Kebijakan. Organisasi Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Lestira Putri Warganegara, Tri.2019. Analysis Of Increasing Strategy Of Original Regional Income In The Implementation Of Regional Autonomy In Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah ESAI Volume 13, No. 1, Januari 2019

Moleong, Lexy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Mangkoessoebroto, Goeritno. (1993). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: FE UGM.

Mardiasmo. (2000). *Laporan Akhir Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD)*. Yogyakarta: PAU UGM.

Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Olsen, J.B., & Eadie, D.C. (1982). *The Game Plan : Governance with Foresight*. Washington : Council of Stare Planning Agencies

Rony Hanitijo Soemitro, 1988, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Website

<https://lutimterkini.com/2022/10/28/bapenda-luwu-timur-optimis-capai-target-penerimaan-daerah/>

<https://warta.luwutimurkab.go.id/2021/12/14/optimalikan-penerimaan-pajak-pelaku-usaha-di-luwu-timur-di-bekali-sosialisasi-uu-hpp/>

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR PERTANYAAN

1. ANALISA *STRENGTH* (KEKUATAN)

Apa yang menjadi kekuatan atau kemampuan pemerintah dalam upaya meningkatkan PAD?

- a. “Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi kekuatan kami dalam hal penerimaan PAD yaitu karena adanya peraturan daerah yang mengatur khususnya kasus pajak. Kemudian adanya dukungan dari sarana dan prasarana dalam melakukan penerimaan. Selain itu adanya dukungan dari petugas yang profesional sangat membantu kami dalam usaha menerima dan mengelola penerimaan dari pajak daerah dan retribusi serta penerimaan-penerimaan lainnya” (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)”
- b. "Kekuatan dan potensi yang kami miliki dalam usaha penerimaan PAD di sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan dari hasil lainnya adalah karena adanya dukungan dari pemerintah berupa sarana dan prasarana, tenaga pengelola yang profesional serta adanya pengawasan dari pemerintah. Dengan adanya ketiga hal tersebut penerimaan PAD dari berbagai sektor yang ada di daerah kami dapat dilaksanakan secara maksimal dengan harapan dapat memberikan masukan yang lebih untuk peningkatan PAD di Kabupaten

Luwu Timur. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu Penyederhanaan tahapan birokrasi serta peningkatan layanan online dalam hal pembayaran pajak sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan; Mengadakan Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah, Melatih Pengelola Data Elektronik (PDE); Melatih operator untuk mengoperasikan menu-menu tampilan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.”(Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

- c. “Untuk memperoleh PAD dari berbagai macam sektor yang ada di Kabupaten Luwu Timur, faktor regulasi yang mengatur besaran dan mekanisme pajak, retribusi dan jenis pembayaran lainnya sangat membantu untuk memperoleh dan mempermudah administrasi. Secara khusus, pembayar pajak dan pungutan yang nakal dapat dihukum berat. Kami menghargai petugas lapangan yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan mereka harus mendapatkan imbalan yang layak”. (Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)
- d. Semua pembayaran yang berhubungan dengan penerimaan yang diperoleh daerah atau PAD terutama. kami sebagai wajib pajak merasa punya kewajiban membayar pajak karena ada peraturan yang mengatur mengenai kewajiban kami dalam membayar pajak. Adanya peraturan tersebut secara tidak langsung sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari pemerintah terhadap sumber-sumber penerimaan daerah seperti

pajak. Dan kami sebagai masyarakat Luwu Timur sudah seharusnya mentaati peraturan tersebut karena ada sanksi yang tegas jika kami tidak mentaati peraturan tersebut." (Pihak Swasta/wajib Pajak, 23 Agustus 2022).

- e. Penerimaan PAD yang bersumber dari berbagai pajak dan retribusi di Luwu Timur ini dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal karena adanya dukungan dari pihak pemerintah, seperti Sarana dan Prasarana yang belum memadai tentu hal ini yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya serta dilaksanakan dengan petugas yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Kami yakin dengan adanya dukungan tersebut penerimaan PAD di Kabupaten Luwu Timur dapat meningkat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dan kami berharap pengelolaan PAD tersebut dapat terlaksana tepat sasaran dan dapat bermanfaat untuk kemajuan di Kabupaten Luwu Timur." (Masyarakat Umum di kabupaten Luwu Timur, 23 Agustus 2022).

2. ANALISA WEAKNESS (KELEMAHAN)

Apa yang menjadi kendala-kendala pemerintah dalam upaya meningkatkan PAD?

- a. "Dalam melakukan penerimaan PAD ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan tersebut. Kekurangan tenaga dilapangan yang melakukan kegiatan penagihan terutama terhadap para wajib pajak/retribusi yang telat. Selain itu belum adanya sanksi yang tegas

terhadap wajib pajak yang tidak mau dan telat membayar pajak/retribusi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian terhadap para wajib pajak oleh pemerintah. Selain itu sistem pengelolaan yang kurang baik dapat juga menjadi faktor kelemahan dalam melaksanakan pungutan PAD." (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

- b. "Kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan penerimaan PAD dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Luwu Timur secara umum terkait dengan kurangnya kemampuan yang petugas dilapangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Masalah kepegawaian tidak hanya kurangnya tenaga profesional tetapi adanya pengaruh dari kurangnya koordinasi dengan seksi/pegawai dengan instansi terkait. Selain itu, ketidakmampuan tersebut juga disebabkan adanya rotasi pegawai yang terlalu cepat (Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)
- c. "Kelemahan yang dimiliki pemerintah terhadap pelaksanaan penerimaan PAD antara lain keterbatasan data mengenai potensi masing-masing daerah yang memungkinkan untuk menambah pajak daerah. Selain itu minimnya perhatian dari pemerintah terhadap wajib pajak memungkinkan adanya keterlambatan pembayaran pajak. Kurangnya tenaga profesional dalam melakukan pemungutan pembayaran dan terdapatnya kolusi dalam penetapan besaran pungutan yang harus dibayar" (Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

- d. "Dalam peningkatan PAD Kami merasa kurang diperhatikan sehingga dalam membayar pajak kami selalu tidak respek dalam pembayaran pajak dan retribusi. Selain itu sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat menghambat jumlah penerimaan PAD. Dan juga belum adanya sanksi yang tegas dalam setiap keterlambatan pembayaran kuitansi. (Pihak Swasta/wajib Pajak, 23 Agustus 2022)
- e. "Kegiatan pemungutan PAD dari hasil pajak dan retribusi mengalami beberapa kendala seperti kurangnya tenaga operasional di lapangan dan adanya permainan dalam penetapan jumlah pajak atau retribusi yang harus tindak lanjuti agar tidak terjadi lagi (Masyarakat Umum di kabupaten Luwu Timur, 23 Agustus 2022)

3. ANALISA OPPORTUNITY (PELUANG)

Potensi-potensi apa yang dapat diangkat dalam usaha peningkatan penerimaan PAD?

- a. "Di Kabupaten Luwu Timur banyak peluang yang dimiliki yang muncul dengan sendirinya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha penerimaan PAD. Peluang tersebut antara lain Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang sangat strategis sehingga bisa dikembangkan untuk usaha-usaha yang dapat melahirkan wajib pajak-wajib pajak baru yang dapat menambah penerimaan PAD kondisi tersebut didukung dengan penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Selain itu Kabupaten Luwu Timur masih memiliki objek pajak yang belum tergali dan yang terpenting bahwa ada rencana pemekaran menjadi propinsi baru yang secara tidak langsung berdampak perbaikan dan penambahan sarana

dan prasarana." (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

- b. "Peluang dalam penerimaan PAD dapat kita lihat dari kualitas pegawai yang melakukan penagihan dan pengelolaan penerimaan PAD. Banyaknya kesempatan diklat dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai sangat membantu meningkatkan penerimaan PAD. Ditunjang dengna adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin maju menambah kemudahan dalam penerimaan PAD." (Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)
- c. "Ada beberpa peluang yang ada di lapangan yang dapat dimanfaatkan pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan PAD. Peluang tersebut antara lain letak kabupaten Luwu Timur yang strategis yang berada pada jalur transportasi propinsi yang memungkinkan munculnya objek pajak baru seiring dengan pertumbuhan kota Luwu Timur dan didukung dengan adanya rencana pemekaran mejadi propinsi. Selain itu dukungan sarana dan prasaran yang semakin membaik membantu meningkatkan usaha dalam penerimaan PAD (Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)
- d. "Bagi Rami peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam usaha meningkatkan peneimaan PAD adalah adanya dukungan sarana dan prasarana yang semakin membaik dan teknologi informasi yang selalu update. Peluang tersebut secara tidak langsung sangt membantu kami melakukan kegiatan kami sehingga kesadaran kami dalam membayar

pajak semakin tinggi. Karena pajak yang kami bayarkan dimanfaatkan untuk membangun kota Luwu Timur untuk kemajuan di segala bidang termasuk terkait dengan bidang kami." (Pihak Swasta/wajib Pajak, 22 Agustus 2022)

- e. "Ada banyak peluang yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur dalam usaha meningkatkan PAD. Peluang tersebut antara lain kondisi daerah yang strategis memungkinkan munculnya objek pajak baru, adanya dukungan dari sarana dan prasarana yang baik serta teknologi informasi membantu kemudahan dalam melakukan kegiatan yang adakaitannya dengan wajib pajak dan yang terakhir adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sangat tinggi..(Masyarakat Umum di kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

4. ANALISA THREAT (ANCAMAN)

Ancaman apa yang dihadapi di lapangan terkait dengan penerimaan PAD?

- a. "Dalam hal ancaman yang bisa mempengaruhi penerimaan PAD, kita dapat melihat pusat permasalahan yang beragam bukan hanya terkait dengan wajib pajak yang bermasalah dengan kewajibannya membayar pajak tetapi juga bersumber dari kondisi ketidakstabilan yang ada di Kabupaten Luwu Timur seperti kondisi keamanan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan ancaman dari wajib pajak itu sendiri antara lain adanya keberatan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar, adanya upaya untuk tidak membayar pajak karena menganggap pajaknya yang tinggi dan juga manajemen pengelolaan yang tidak baik sehingga tidak

sanggup membayar pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan." (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

- b. "Ancaman yang terjadi dalam penerimaan PAD di Kabupaten Luwu Timur bersumber dari berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Ancaman tersebut secara jelas akan dapat mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Luwu Timur. Ancaman tersebut antara lain seperti adanya upaya untuk menghindari pajak oleh wajib pajak dan adanya keberatan dengan umlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut antara lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya oleh wajib pajak serta untuk menutup-nutupi usaha yang dilakukannya karena tidak berizin atau ilegal" (Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)
- c. "Ancaman dalam penerimaan PAD di Kabupaten Luwu Timur lahir dari ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah karena banyak kasus pajak yang dibayarkan mereka di korupsi oleh pihak tertentu. Sehingga menimbulkan keengganan wajib pajak membayar pajak karena takut uang yang dibayar tidak bermanfaat baik dan justru dikorupsi oleh pihak tertentu. Ancaman dalam penerimaan PAD juga disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi politik, ekonomi dan keamanan yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha para wajib pajak sehingga mereka akan merasa berat untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar

pajak.(Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

- d. "Sebagai wajib pajak alasan kami untuk tidak membayar pajak biasanya karena ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah seiring dengan munculnya berita akhir-akhir ini mengenai penyelewengan pajak yang dilakukan pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari hasil pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Selain itu kondisi usaha kami yang selalu tidak stabil juga menjadikan kami agak sedikit berat dalam membayar pajak karena kami juga tidak dapat merasakan langsung manfaat dari pajak yang kami bayarkan. Kami sangat berharap kepada pemerintah agar pengelolaan masalah pajak mendapatkan perhatian yang serius dan Rebaikan bersama dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak. karena sektor pajak ini menyumbang keuangan daerah lumayan besar." (Pihak Swasta/wajib Pajak, 22 Agustus 2022)
- e. "Permasalahan yang menjadi ancaman dalam usaha pemerintah untuk melakukan penerimaan PAD antara lain/ karena adanya kecenderungan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak dengan berbagai alasan kemudahan adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah terkait dengan kasus-KN di pajak sehingga membuat orang malas untuk membayar pajak sebab takut uang yang dibayar tidak memberikan manfaat malah menguntungkan segelintir orang." (Masyarakat Umum di kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)

5. ANALISA STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAD

Strategi apa yang diterapkan dalam usaha meningkatkan penerimaan PAD?

- a. Mengikutisertakan pegawai dalam pelaksanaan diklat dan pelatihan
- b. Menggali potensi kemungkinan adanya objek pajak/retribusi baru.
- c. Meningkatkan dukungan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung penerimaan PAD
- d. Melakukan Kerjasama lintas instansi dalam rangka membantu dan mengawasi penerimaan PAD
- e. Memanfaatkan kemajuan teknologi
- f. Meningkatkan pelayanan dan perhatian terhadap para wajib pajak
- g. Melaksanakan peraturan terkait dengan penerimaan PAD dengan tegas termasuk pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- h. Mengkaji kekurangan dan memaksimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah
- i. Menumbuhkan kepercayaan kepada wajib pajak dengan memperbaiki pengelolaan PAD.
- j. Menstabilan kondisi keamanan, politik dan ekonomi
- k. Menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan termasuk KKN

LAMPIRAN 2 PEDOMAN KUISIONER
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN LUWU TIMUR

A. FAKTOR INTERNAL

1. Menurut Bapak/Ibu apakah SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya.
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
2. Menurut Bapak/Ibu apakah pembagian tugas untuk petugas pengelola PAD dapat membantu meningkatkan PAD.
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
3. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat perda yang mengatur penerimaan PAD dapat membantu meningkatkan PAD.
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
4. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya sarana dan prasarana pendukung dapat membantu meningkatkan PAD.
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
5. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya keterlibatan dan kerjasama

- dengan beberapa instansi dalam penerimaan PAD dapat membantu meningkatkan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
6. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya dukungan anggaran operasional yang berupa pemberian insentif pada petugas pemunggut dapat membantu meningkatkan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
7. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya pengawasan yang diberikan pemerintah terhadap pengeolaan PAD dapat membantu meningkatkan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
8. Menurut Bapak/Ibu apakah kekurangan tenaga operasional dalam penerimaan PAD dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
9. Menurut Bapak/Ibu apakah belum maksimal koordinasi antara seksi dan instansi terkait pemerintah dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD.
- a. Sangat setuju

- b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
10. Menurut Bapak/Ibu apakah belum mampu pemerintah dalam menetapkan sanksi dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
11. Menurut Bapak/Ibu apakah perhatian wajib pajak/retribusi dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
12. Menurut Bapak/Ibu apakah keterbatasan data potensi daerah dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
13. Menurut Bapak/Ibu apakah perputaran/perpindahan (*turn over*) pegawai pengelola PAD terlalu cepat dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
14. Menurut Bapak/Ibu apakah sistim pengelolaan keuangan daerah

yang belum maksimal dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD.

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak setuju

B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Menurut Bapak/Ibu apakah banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola penerimaan PAD dapat membantu meningkatkan PAD
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
2. Menurut Bapak/Ibu apakah lokasi yang strategis dapat membantu meningkatkan PAD
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
3. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya moderenisasi sarana dan prasarana dapat membantu meningkatkan PAD
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
4. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya kesadaran membayar pajak dari masyarakat dapat membantu meningkatkan PAD
 - a. Sangat setuju

- b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
5. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya objek pajak/retribusi yang belum tergali dapat membantu meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
6. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya teknologi informasi yang makin maju dapat membantu meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
7. Menurut Bapak/Ibu apakah penambahan jumlah penduduk dapat membantu meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
8. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya krisis kepercayaan dapat menghambat meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
9. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya instabilitas keamanan dapat menghambat meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju

- c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
10. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi dapat menghambat meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
11. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya manajemen pengusaha yang kurang baik dapat menghambat meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
12. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya KKN dalam pengelolaan PAD dapat menghambat meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
13. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya wajib pajak/retribusi yang menghindar membayar pajak/retribusi dapat menghambat meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
14. Menurut Bapak/Ibu apakah perkembangan politik dan ekonomi dapat menghambat meningkatkan PAD
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju

- c. Kurang setuju
- d. Tidak setuju

LAMPIRAN 3

**REKAPITULASI HASIL KUISIONER FAKTOR INTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN LUWU
TIMUR**

FAKTOR INTERNAL	PERTANYAAN		JAWABAN				JUMLAH
			A	B	C	D	
KEKUATAN	1	SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD memiliki kemampuan dan kompetensi	11	4	0	0	15
	2	Pembagian tugas untuk petugas pengelola PAD	10	4	1	0	15
	3	Terdapat perda yang mengatur penerimaan PAD	12	3	0	0	15
	4	Terdapat sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan PAD	9	5	1	0	15
	5	Adanya keterlibatan dan kerjasama dengan beberapa instansi dalam penerimaan PAD	11	3	1	0	15
	6	Adanya dukungan anggaran operasional yang berupa pemberian insentif pada petugas pemunggut	10	5	0	0	15
	7	Adanya pengawasan yang diberikan pemerintah terhadap pengeolaan PAD	7	4	2	2	15
KELEMAHAN	1	Terdapat kekurangan tenaga operasional dalam penerimaan PAD	12	2	1	0	15
	2	Belum maksimal koordinasi antara seksi dan instansi terkait	13	1	1	0	15
	3	Belum mampu menetapkan sanksi	11	2	2	0	15
	4	Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi	10	3	2	0	15
	5	Keterbatasan data potensi daerah	7	5	3	0	15
	6	Perputaran/perpindahan (turn over) pegawai terlalu cepat	10	3	2	0	15
	7	Sistim pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal	11	2	2	0	15

LAMPIRAN 4
ANALISA INTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN SINTANG

NO	PERTANYAAN	BOBOT	SKOR	TOTAL
A	KEKUATAN			
1	SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD memiliki kemampuan dan kompetensi	0.08	3.5	0.28
2	Pembagian tugas untuk petugas pengelola PAD	0.07	3	0.21
3	Terdapat perda yang mengatur penerimaan PAD	0.08	3	0.24
4	Terdapat sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan PAD	0.07	2	0.14
5	Adanya keterlibatan dan Kerjasama dengan beberapa instansi dalam penerimaan PAD	0.08	3	0.24
6	Adanya dukungan operasional anggaran operasional yang berupa pemberian insentif pada petugas pemungut.	0.07	2	0.14
7	Adanya pengawasan yang diberikan pemerintah terhadap pengelolaan PAD	0.07	3	0.21
	TOTALKEKUATAN	0,52		1,46
B	KELEMAHAN			
1	Terdapat kekurangan tenaga operasional dalam penerimaan PAD	0.07	3	0.21
2	Belum maksimal koordinasi antara seksi dan instansi terkait	0.07	3	0.21
3	Belum mampu menetapkan sanksi	0.07	2	0.14
4	Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi	0.07	2	0.14
5	Keterbatasan data potensi daerah	0.07	2	0.14
6	Perputaran/perpindahan (turn over) pegawai terlalu cepat	0.06	2	0.12
7	Sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal	0.07	2	0.14
	TOTAL KELEMAHAN	0,48		1,1

LAMPIRAN 5

REKAPITULASI HASIL KUISIONER FAKTOR INTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN SINTANG

FAKTOR EKSTERNAL	PERTANYAAN		JAWABAN				JUMLAH
			A	B	C	D	
PELUANG	1	Banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola penerimaan PAD	11	4	0	0	15
	2	Berada pada daerah yang strategis	9	4	2	0	15
	3	Adanya modernasi sarana dan prasarana	9	3	1	2	15
	4	Adanya kesadaran membayar pajak/retribusi dari masyarakat	11	2	1	1	15
	5	Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali	12	2	1	0	15
	6	Teknologi informasi yang semakin maju	10	3	1	1	15
	7	Perkembangan jumlah penduduk	8	4	2	1	15
ANCAMAN	1	Krisis kepercayaan terhadap pemda	10	3	1	1	15
	2	Instabilitas keamanan	7	4	3	1	15
	3	Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi	9	3	2	1	15
	4	Manajemen pengusaha yang tidak baik	5	6	3	1	15
	5	KKN yang cenderung makin kompleks	8	4	2	1	15
	6	Penghindaran pembayaran pajak	7	4	3	1	15
	7	Perkembangan politik dan ekonomi	9	3	1	2	15

LAMPIRAN 6

ANALISA EKSTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	PERTANYAAN	BOBOT	SKOR	TOTAL
A	PELUANG			
1	Banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola penerimaan PAD	0.07	2	0.14
2	Berada pada daerah yang strategis	0.08	3	0.24
3	Adanya modernisasi sarana dan prasarana	0.07	2	0.14
4	Adanya kesadaran membayar pajak/retribusi dari masyarakat	0.08	3	0.24
5	Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali	0.08	3	0.24
6	Teknologi informasi yang makin maju	0.07	3	0.21
7	Perkembangan jumlah penduduk	0.07	2	0.14
	TOTALPELUANG	0,58		1.35
B	ANCAMAN			
1	Krisis kepercayaan terhadap Pemda	0.07	3	0.21
2	Instabilitas keamanan	0.07	2	0.14
3	Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi	0.07	2	0.14
4	Manajemen pengusaha yang tidak baik	0.06	1	0.06
5	KKN yang cenderung makin kompleks	0.07	2	0.14
6	Penghindaran pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi	0.07	2	0.14
7	Perkembangan politik dan ekonomi	0.07	2	0.14
	TOTAL ANCAMAN	0,42		0.97
	PELUANG - ANCAMAN			0.38